



# RENCANA KERJA

## PERANGKAT DAERAH | 2023

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Ahmad Yani No. 209 Telp./Fax (0334) 881586

E-mail : [kesbangpol@lumajangkab.go.id](mailto:kesbangpol@lumajangkab.go.id)

Lumajang



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 209 Telp./Fax. (0334) 881586

e-mail : [kesbangpol@lumajangkab.go.id](mailto:kesbangpol@lumajangkab.go.id)

L U M A J A N G

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Nomor : 188/470/427.75/2022

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)  
PADA BAKESBANGPOL TAHUN 2023**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kegiatan dan anggaran perlu untuk segera disusun rencana kerja OPD untuk periode satu tahun kedepan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan keputusan tentang Rencana Kerja (RENJA) Bakesbangpol Tahun 2023 dengan Keputusan Kepala Bakesbangpol Kab. Lumajang.
- Mengingat : 1. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, tambahan lembaran negara RI No. 4421);
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008;
3. PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Perpres RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
5. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007;
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Daerah;
7. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
9. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
10. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Perda Kab. Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kab. Lumajang Tahun 2016 No. 16, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Lumajang No. 90) sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kab. Lumajang Tahun 2021 No. 13, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Lumajang No. 141);
12. Perda Kab. Lumajang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perda No. 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2018-2023;
13. Perbup Lumajang Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023 sebagai berikut :

Ketua : Purnah, S.AP

Anggota : 1. Fatoni Nur Wahyudi  
2. Yudik Firmana  
3. Muhammad Iman Hakiki  
4. Ratih Tunjung Sari

**KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengumpulkan dan menyajikan data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
2. Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
3. Menjalankan rencana kerja di tahun berkenaan;
4. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah;
5. Merumuskan perencanaan di tahun berikutnya.

**KETIGA** : Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Bakesbangpol Tahun 2023 dimaksud dalam diktum kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang  
Pada tanggal : 25 Agustus 2022

**KEPALA BAKESBANGPOL**



Drs. ARIF SUKAMDI  
NIP. 19720204 199101 1 001

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan visi, misi dan pencapaian sasaran serta tujuan yang ditetapkan, berdasarkan P-Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2023 diperlukan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai jaminan obyektif untuk tercapainya tugas pokok dan fungsi.

Program / kegiatan Tahun 2023 yang terangkum dalam buku ini diharapkan dapat menjadi acuan dasar dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas bagi aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Harapan kami dengan tersusunnya rencana kerja ini akan memberikan dukungan yang optimal dalam peningkatan kinerja dan kegiatan di Tahun 2023.

Lumajang, 25 Agustus 2022

KEPALA BAKESBANGPOL



Drs. ARIF SUKAMDI  
NIP. 19720204 199101 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II : HASIL EVALUASI RENJA-PD TAHUN 2021</b>	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu .....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan .....	15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....	19
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	36
2.6. Analisis Pelaksanaan Inovasi .....	43
<b>BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah .....	50
3.2. Tujuan dan Sararan Renja SKPD .....	52
3.3. Program dan Kegiatan .....	53
<b>BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	
4.1. Program Utama .....	74
4.2. Sasaran dan Indikator Kinerja .....	77
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dengan telah ditetapkannya Perda Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023, Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang berkewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Tahun 2018-2023, sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 7 ayat (1) yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman kepada P-RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Atas dasar hal tersebut, Bakesbangpol berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang telah tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Tahun 2018-2023. Untuk mengimplementasikan dan mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, maka perlu ditetapkan dan disusun RENJA Tahun 2023.

Renja adalah dokumen perencanaan PD untuk periode jangka pendek 1 (satu) tahun ke depan. Fungsi Renja PD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD dalam membangun daerah sebagai turunan dari P-Renstra dalam pembangunan daerah. Renja PD memuat hasil evaluasi Renja tahun sebelumnya. Dengan demikian Renja PD merupakan penjabaran dari dokumen P-Renstra PD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja PD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh PD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 adalah :

- 1.2.1. Landasan Idiil : Pancasila
- 1.2.2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
- 1.2.3. Landasan Operasional :
  - a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jatim;
  - b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  - c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - f. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
  - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-05889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- o. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : SE-31 M.PAN/XII/2004 perihal Penetapan Kinerja;
- p. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 141);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



- s. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
- t. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Lumajang;
- u. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Lumajang;
- v. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- w. Instruksi Bupati Lumajang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Kabupaten Lumajang;
- x. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/12/427.12/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan Pemanfaatan Sumberdaya Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
- y. Perubahan Renstra Tahun 2018 – 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 selaras dengan maksud dan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan.

#### **1.3.1. Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja dan evaluasi Bakesbangpol dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik serta penyelenggaraan fungsi selama tahun 2023, yang meliputi :

- a) Penetapan program kerja dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur;

- b) Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis pembinaan kesatuan bangsa dan politik;
- c) Penyusunan pedoman teknis dan penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa dan politik;
- d) Peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan, kerukunan antar umat, politik dalam negeri, dan pembinaan organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat;
- e) Peningkatan kajian masalah strategis dan penanganannya di bidang ideologi, politik dalam negeri, ekonomi sosial dan ketertiban masyarakat;
- f) Pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- g) Pemberian saran dan pertimbangan di bidang tugasnya kepada Bupati; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugasnya yang diberikan Bupati.

### **1.3.2. Tujuan**

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a) Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- b) Menyusun penilaian kinerja tahunan (LAKIP);
- c) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- d) Untuk menjadi tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e) Untuk menjadi terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan RENJA Tahun 2023 mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 129 sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA-PD TAHUN LALU**

Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran RENJA PD, Program dan Kegiatan.

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Menjelaskan mengenai rencana kerja program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan serta sumber pendanaan dan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program/kegiatan pada Bakesbangpol.

##### **BAB V PENUTUP**

Memuat catatan paling penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA-PD TAHUN 2021**

#### **2.1. EVALUASI RENJA-PD TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Dalam upaya mendukung visi dan misi Kepala daerah terpilih 2018-2023, sesuai dengan Renstra 2018-2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang telah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2021. Renja 2021 memuat rencana program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran dan tujuan tahunan.

Renja Tahun 2021 disusun untuk memberikan fokus pada perencanaan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki dan diajukan dalam KUA-PPAS (Kebijakan Umum dan Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara) Tahun 2021. Setelah melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah) dan diskusi-diskusi PD serta penetapan KUA-PPAS Kabupaten Lumajang Tahun 2021, ditetapkanlah DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2021.

Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2021. Target dan realisasi dapat di lihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

**Tabel 2.1.TC. 29**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022**

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/ Kegiatan Tahun n- 2023 (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) – 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program/dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) – 2021 (Renja PD)			Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Th (n-1) – 2022 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Tahun Berjalan (Renstra PD)	
					Target Renja PD Th (n-2) – 2021	Realisasi Renja PD Th (n-2) - 2021	Realisasi (%)		Realisasi Capaian Pro/Keg/Sub Keg s/d Tahun Berjalan (Th n-1) – 2022 (Renstra PD)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11 = (10/9)
<b>8.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>									
<b>8.01.</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>									
<b>8.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>8.01.02.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>N/A</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	N/A	N/A	2 fasilitasi	2 fasilitasi	2 fasilitasi	2 fasilitasi	2 fasilitasi	100%
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah jenis dokumen terkait Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	N/A	N/A	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	1 jenis dokumen	1 jenis dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/ Kegiatan Tahun n- 2023 (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) – 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program/dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) – 2021 (Renja PD)			Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Th (n-1) – 2022 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Tahun Berjalan (Renstra PD)	
					Target Renja PD Th (n-2) – 2021	Realisasi Renja PD Th (n-2) - 2021	Realisasi (%)		Realisasi Capaian Pro/Keg/Sub Keg s/d Tahun Berjalan (Th n-1) – 2022 (Renstra PD)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11 = (10/9)
<b>8.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>99,99%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>8.01.03.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>11 dokumen</b>	<b>N/A</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>3 dokumen</b>
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Parpol yang terfasilitasi terkait Banpol	N/A	N/A	10 parpol	10 parpol	10 parpol	5 fasilitasi	5 fasilitasi	5 fasilitasi
		Jumlah fasilitasi dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilu Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	N/A	N/A	2 fasilitasi	2 fasilitasi	2 fasilitasi	2 fasilitasi	2 fasilitasi	2 fasilitasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/ Kegiatan Tahun n- 2023 (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) – 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program/dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) – 2021 (Renja PD)			Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Th (n-1) – 2022 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Tahun Berjalan (Renstra PD)	
					Target Renja PD Th (n-2) – 2021	Realisasi Renja PD Th (n-2) - 2021	Realisasi (%)		Realisasi Capaian Pro/Keg/Sub Keg s/d Tahun Berjalan (Th n-1) – 2022 (Renstra PD)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11 = (10/9)
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/ Pemilukada, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	15 laporan	N/A	12 laporan	7 laporan	7 laporan	NIHIL	NIHIL	NIHIL
<b>8.01.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>55%</b>
<b>8.01.04.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>11 dokumen</b>	<b>N/A</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah fasilitasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	N/A	N/A	4 fasilitasi	4 fasilitasi	4 fasilitasi	4 fasilitasi	1 fasilitasi	1 fasilitasi
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monev dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah jenis laporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	N/A	N/A	6 jenis laporan	1 jenis laporan	1 jenis laporan	1 jenis laporan	1 jenis laporan	1 jenis laporan
<b>8.01.05</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>70%</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/ Kegiatan Tahun n- 2023 (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) – 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program/dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) – 2021 (Renja PD)			Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Th (n-1) – 2022 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Tahun Berjalan (Renstra PD)	
					Target Renja PD Th (n-2) – 2021	Realisasi Renja PD Th (n-2) - 2021	Realisasi (%)		Realisasi Capaian Pro/Keg/Sub Keg s/d Tahun Berjalan (Th n-1) – 2022 (Renstra PD)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11 = (10/9)
<b>8.01.05.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>N/A</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah fasilitasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	N/A	N/A	2 fasilitasi	2 fasilitasi	2 fasilitasi	3 fasilitasi	3 fasilitasi	2 fasilitasi
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monev &Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah jenis laporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, FKUB dan Penghayat Kepercayaan	N/A	N/A	2 jenis laporan	1 jenis laporan	1 jenis laporan	NIHIL	NIHIL	NIHIL
<b>8.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS &amp;FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Persentase potensi permasalahan strategis yang ditangani</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>99,92%</b>	<b>99,92%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan Nasional	1 dokumen	N/A	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		Jumlah jenis dokumen perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan penanganan konflik sosial	1 dokumen	N/A	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen



Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/ Kegiatan Tahun n- 2023 (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) – 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program/dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) – 2021 (Renja PD)			Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Th (n-1) – 2022 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Tahun Berjalan (Renstra PD)	
					Target Renja PD Th (n-2) – 2021	Realisasi Renja PD Th (n-2) - 2021	Realisasi (%)		Realisasi Capaian Pro/Keg/Sub Keg s/d Tahun Berjalan (Th n-1) – 2022 (Renstra PD)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11 = (10/9)
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah fasilitasi yang termonitoring kewaspadaan daerah	N/A	N/A	21 kecamatan	4 kec.	4 kec.	1 fasilitasi	1 fasilitasi	1 fasilitasi
		Jumlah fasilitasi pengamanan tertutup di Bidang penanganan konflik sosial	N/A	N/A	150 fasilitasi	135 fasiltasi	135 fasiltasi	1 fasilitasi	1 fasilitasi	1 fasilitasi
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah koordinasi Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan	N/A	N/A	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan
		Jumlah kegiatan koordinasi Bidang Penanganan Konflik di Daerah	N/A	N/A	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	1 fasilitasi	1 fasilitasi	1 fasilitasi
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah	N/A	N/A	12 fasilitasi	12 fasilitasi	12 fasilitasi	12 fasilitasi	12 fasilitasi	12 fasilitasi
<b>8.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>98,41%</b>	<b>98,41%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>8.01.01.201</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
8.01.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen yang dihasilkan	N/A	N/A	5 jenis dokumen	5 jenis dokumen	5 jenis dokumen	NIHIL	NIHIL	NIHIL
<b>8.01.01.202</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>98,69%</b>	<b>98,69%</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/ Kegiatan Tahun n- 2023 (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) – 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program/dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) – 2021 (Renja PD)			Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Th (n-1) – 2022 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Tahun Berjalan (Renstra PD)	
					Target Renja PD Th (n-2) – 2021	Realisasi Renja PD Th (n-2) - 2021	Realisasi (%)		Realisasi Capaian Pro/ Keg/ Sub Keg s/d Tahun Berjalan (Th n-1) – 2022 (Renstra PD)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11 = (10/9)
8.01.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN pada Bakesbangpol	26 org	N/A	12 bulan	12 bulan	12 bulan	26 Org	26 Org	26 Org
8.01.01.202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	N/A	N/A	12 bulan	9 bulan	9 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
<b>8.01.01.203</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>97,92%</b>	<b>97,92%</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>
8.01.01.203.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	N/A	3 bulan	3 bulan	3 bulan	NIHIL	NIHIL	NIHIL
<b>8.01.01.205</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Fasilitasi Administrasi PD</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>
8.01.01.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	N/A	N/A	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
8.01.01.205.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	N/A	N/A	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
<b>8.01.01.206</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>97,14%</b>	<b>97,14%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>95,00%</b>
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	N/A	N/A	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	N/A	N/A	25 jenis	25 jenis	25 jenis	16 jenis	16 jenis	16 jenis
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	N/A	N/A	0 jenis	-	-	2 jenis	2 jenis	2 jenis
		jumlah fasilitasi penggandaan dokumen	N/A	N/A	60 fasilitasi	34 fasilitasi	34 fasilitasi	20 fasilitasi	20 fasilitasi	17 fasilitasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/ Kegiatan Tahun n- 2023 (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) – 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program/dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) – 2021 (Renja PD)			Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Th (n-1) – 2022 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Tahun Berjalan (Renstra PD)	
					Target Renja PD Th (n-2) – 2021	Realisasi Renja PD Th (n-2) - 2021	Realisasi (%)		Realisasi Capaian Pro/Keg/Sub Keg s/d Tahun Berjalan (Th n-1) – 2022 (Renstra PD)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11 = (10/9)
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah exemplar penyediaan bahan bacaan yang dibeli	N/A	N/A	24 eksemplar	24 eksemp	24 eksemp	12 eks	12 eks	12 eks
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	N/A	N/A	1 kali	1 kali	1 kali	NIHIL	NIHIL	NIHIL
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rakor SKPD	N/A	N/A	30 fasilitasi	5 fasilitasi	5 fasilitasi	24 fasilitasi	24 fasilitasi	20 fasilitasi
		Jumlah fasilitasi koordinasi dan konsultasi SKPD	N/A	N/A	12 bulan	11 bulan	11 bulan			
<b>8.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>98,86%</b>	<b>98,86%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis rekening yang dibayar	N/A	N/A	4 jenis rekening	4 jenis rekening	4 jenis rekening	4 jenis rekening	4 jenis rekening	4 jenis rekening
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	N/A	N/A	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
<b>8.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>92,31%</b>	<b>92,31%</b>	<b>100%</b>	<b>90,00%</b>	<b>90,00%</b>
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah jenis kendaraan dinas	N/A	N/A	9 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis
		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	N/A	N/A	24 unit	8 unit	8 unit	24 unit	6 unit	6 unit
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	N/A	N/A	5 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis
		Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor/bangunan lain yang dipelihara	N/A	N/A	11 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	0 jenis	0 jenis

Dari hasil data diatas dapat disampaikan bahwa :

- Perencanaan yang dilakukan di Tahun 2021 hanya terfokus pada belanja langsung, sehingga pada Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik tidak terencanakan fasilitasi pemberian dana bantuan keuangan bagi partai politik yang sifatnya rutin sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan selanjutnya dikuatkan dengan Keputusan Bupati Lumajang tentang Alokasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.
- Belum terencananya fasilitasi pemberian hibah bagi Ormas/LSM di Kabupaten Lumajang pada Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, hal ini disebabkan belum adanya proposal yang masuk ke Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk pengajuan hibah tahun 2021.
- Dengan 2 aktivitas yang tidak terencanakan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 namun terakomodir pada DPA maupun DPPA Bakesbangpol TA. 2021.

## **2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN**

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang tertuang dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2023.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel 2.2.sebagai berikut :

**Tabel 2.2.TC. 30**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Indikator Tujuan / Sasaran	SPM / Standart Nasional	IKK	TARGET					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	
2	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)	N/S	N/A	N/A	N/A	88,00	89,00	90,00	88,00	89,00	89,00	90,00	

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja, maka diperlukan data-data yang dapat meresrepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan, Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan.

**Tabel 2.3.**  
**Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi**

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Jenis Data	Formulasi / Rumus Perhitungan	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Monitoring dan Evaluasi
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kuantitatif	$\frac{\text{Jumlah koresponden puas}}{\text{Jumlah koresponden keseluruhan}} \times 100\%$	Questioner	Setempat (pada saat itu)
2	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)	Kuantitatif	$\frac{\text{Jumlah konflik terkait Ipoleksosbud dan Tibmas yang telah diatasi}}{\text{Jumlah konflik terkait Ipoleksosbud dan Tibmas yang ada}} \times 100\%$	Perhitungan kasus yang terjadi di masyarakat	Melakukan jaring informasi terkait kasus yang terjadi

### **2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bakesbangpol Kab. Lumajang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dilihat pada tingkat kondusifitas wilayah Kabupaten Lumajang. Dalam pencapaian kinerja, pengukuran tingkat keberhasilan dapat diukur melalui program yang telah dilaksanakan dan direncanakan.

Kegiatan evaluasi perencanaan dengan melakukan pengkajian ulang terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai tolak ukur dalam melakukan perencanaan pada masa mendatang. Sebagai bagian perencanaan yang memiliki fungsi dasar dalam manajemen dengan tujuan untuk mendapat informasi sejauhmana efisiensi dan efektifitas pencapaian sasaran suatu kegiatan.

Evaluasi terhadap perencanaan telah dilakukan dengan baik, walaupun belum semua masalah yang timbul dapat langsung dipecahkan tetapi seluruh kegiatan evaluasi perencanaan telah merujuk kepada peraturan yang berlaku sehingga telah diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pencapaian efisiensi dan efektifitas.

Berikut merupakan isu-isu penting dari perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, antara lain :

#### **A. Urusan Idiologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama**

- Semakin mudarnya wawasan kebangsaan di masyarakat yang dapat terlihat dari tindakan dan perilaku hidup yang semakin hari semakin memprihatinkan, seperti sentimen dan fanatisme suku, rasa dan antar golongan agama yang sering terjadi.
- Masyarakat Kabupaten Lumajang mayoritas bersuku Jawa dan Madura beragama Islam, walaupun kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Lumajang cukup harmonis



tetapi sering terjadi fanatisme aliran agama dan kepercayaan tertentu yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat;

- Rendahnya pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa, sehingga sering terjadi gesekan/konflik antar suku dan agama di masyarakat.

## **B. Urusan Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan**

- Iklim politik nasional yang belum kondusif sering menimbulkan gejolak yang mengarah kepada anarkisme, mengingat saat ini memasuki tahun-tahun politik yang akan dilaksanakan pemilihan umum;
- Masih rendahnya pemahaman politik masyarakat sehingga sering terjadi konflik yang diakibatkan provokasi pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepentingan;
- Masih minimnya fasilitasi bagi partai politik, LSM dan Ormas yang mana hal tersebut merupakan infrastruktur politik, sehingga mengakibatkan proses pendewasaan politik masyarakat relatif lambat.

## **C. Urusan Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Sosial**

- Kurangnya kemampuan aparat dalam mendeteksi, mencegah dan mengantisipasi secara dini sebagai gejolak sosial politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat;
- Belum sinergisnya aparat dan tokoh-tokoh masyarakat/agama/adat dan lainnya dalam mencegah, menangani dan menghentikan konflik sosial;
- Belum berperan aktifnya aparat, tokoh masyarakat/agama/adat dan lainnya dalam upaya penanganan keamanan lingkungan;
- Belum optimalnya peran forum strategis Bakesbangpol dalam deteksi dini permasalahan keamanan dan ketertiban.

Isu-isu strategis bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4.**  
**Identifikasi Permasalahan**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas aparatur daerah	Belum optimalnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan politik di masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih terjadinya gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan;</li> <li>2. Minimnya pemahaman ideologi pancasila dan karakter bangsa pada generasi muda;</li> <li>3. Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat;</li> <li>4. Belum optimalnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;</li> <li>5. Masih adanya potensi permasalahan strategis dan konflik ekonomi, sosial dan budaya.</li> </ol>

**A. Strategi S-O (Strength/Kekuatan–Opportunities/Peluang)**

- Memaksimalkan kelembagaan yang ada agar optimalisasi Tupoksi dapat tercapai;
- Efisiensi dan efektifitas anggaran yang ada guna tercapainya sasaran dan tujuan kegiatan;
- Pemfasilitasian yang optimal dengan dukungan anggaran yang memadai hingga diharapkan dapat mewujudkan sinergitas dengan lembaga terkait dalam terciptanya stabilitas politik.

**B. Strategi W-O (Weakness/Kelemahan–Opportunities/Peluang)**

- Meningkatkan harmonisasi diharapkan aparatur menciptakan hubungan yang harmonis dengan lembaga-lembaga (LSM, Ormas, Orsospol dan Nirlaba lainnya) agar terciptanya stabilitas politik;
- Pengoptimalan sosialisasi tentang pemahaman pentingnya kesatuan bangsa hingga tercapai harmonisasi di masyarakat;

- Pengoptimalan publikasi di media tentang pentingnya kesatuan bangsa.

### **C. Strategi S – T (Strength/Kekuatan-Threats/Ancaman)**

- Pengoptimalan SDM aparatur yang ada untuk dapat melaksanakan tupoksi dan mengarahkan personil dalam membina hubungan kerja dengan LSM, Ormas dan Nirlaba lainnya agar tidak terjadi efek negatif dari ancaman instabilitas;
- Meningkatkan pembinaan terhadap kewaspadaan dini masyarakat guna meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat;
- Meningkatkan pendidikan politik di masyarakat;
- Meningkatkan pembinaan/sosialisasi tentang pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa serta toleransi antar umat beragama.

### **D. Strategi W – T (Weakness/Kelemahan – Threats/Ancaman)**

- Meningkatkan pendidikan formal maupun non formal bagi aparatur guna menunjang kinerja;
- Untuk meminimalisir efek negatif dari kelemahan kelembagaan SDM aparatur dan alokasi anggaran, serta ancaman instabilitas politik akibat dari tidak maksimalnya pelaksanaan tupoksi dilakukan upaya pembinaan hubungan baik dengan unsur internal dan eksternal, agar roda organisasi dapat tetap berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Hasil identifikasi yang diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap kondisi yang ada di Bakesbangpol dan didapatkan permasalahan yang saat ini masih menjadi kendala dalam mewujudkan kondusifitas wilayah.

## **2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Rancangan awal yang disusun pada Bakesbangpol Kab.Lumajang telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Badan. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lumajang, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen

Rencana Kinerja memuat tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol Kab.Lumajang. Dokumen rencana kinerja mencakup juga informasi tentang program, kegiatan, sub kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Bakesbangpol Kab. Lumajang.

Review terhadap Rancangan Awal RKPA Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Keg./ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1.1.3	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 laporan	11.550.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	6 laporan	12.000.000	
2.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>		<b>Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>100%</b>	<b>1.200.669.548</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>		<b>Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>100%</b>	<b>1.205.077.348</b>	
2.2.	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik</b>		<b>Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>1 dok</b>	<b>1.200.669.548</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik</b>		<b>Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>1 dok</b>	<b>1.205.077.348</b>	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Keg./ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
2.1.1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Bakesbang pol	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 dokumen	1.148.400	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Bakesbang pol	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 dokumen	1.200.000	
2.1.2	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab. Lumajang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	422 org	1.186.696.148	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab. Lumajang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	422 org	1.190.927.348	
2.1.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 laporan	12.825.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 laporan	12.950.000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Keg./ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
<b>3.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>		<b>Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</b>	<b>100%</b>	<b>79.376.000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>		<b>Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</b>	<b>100%</b>	<b>80.400.000</b>	
<b>3.1.</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>		<b>Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>79.376.000</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>		<b>Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>80.400.000</b>	
3.1.1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Bakesbangpol	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 dokumen	1.110.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Bakesbangpol	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 dokumen	1.200.000	
3.1.2	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Lumajang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	201 orang	64.706.000	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Lumajang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	201 orang	65.400.000	



No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Keg./ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
3.1.3	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	52 laporan	13.560.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	52 laporan	13.800.000	
<b>4.</b>	<b>PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>		<b>Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya</b>	<b>100%</b>	<b>127.582.000</b>	<b>PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>		<b>Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya</b>	<b>100%</b>	<b>127.670.000</b>	
<b>4.1.</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>		<b>Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan teknis Fasilitasi Teknis Pemantapan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya</b>	<b>3dokumen</b>	<b>127.516.000</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>		<b>Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan teknis Fasilitasi Teknis Pemantapan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>127.670.000</b>	
4.1.1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya & Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Bakesbangpo 1	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Yang disusun	3 dokumen	2.557.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya & Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, FKUB & Penghayat Kepercayaan	Bakesbangpo 1	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Yang disusun	3 dokumen	2.600.000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Keg./ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
4.1.2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Lumajang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	680 orang	112.155.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Lumajang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	601 orang	112.200.000	
4.1.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 laporan	12.870.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 laporan	12.870.000	
<b>5.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>		<b>Persentase potensi permasalahan strategis yang ditangani</b>	<b>100%</b>	<b>304.823.300</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>		<b>Persentase potensi permasalahan strategis yang ditangani</b>	<b>100%</b>	<b>320.726.000</b>	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Keg./ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
5.1.	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>		<b>Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan Nasional pemantapan kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>1Dokumen</b>	<b>304.823.300</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>		<b>Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan Nasional pemantapan kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>326.010.000</b>	
5.1.1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Bakesbangpol	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 dokumen	6.134.800	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Bakesbangpol	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 dokumen	6.320.000	
5.1.2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Lumajang	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	185 orang	173.118.500	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Lumajang	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	188 orang	178.116.000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Keg./ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
5.1.3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Lumajang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	160 orang	48.770.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Lumajang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	260 orang	59.490.000	
5.1.4	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	4 dokumen	76.800.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	4 dokumen	76.800.000	
<b>6.</b>	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>		<b>Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>3.251.873.045</b>	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>		<b>Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>3.310.251.198</b>	
<b>6.1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>100%</b>	<b>24.778.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>100%</b>	<b>25.150.000</b>	
6.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bakesbangpo 1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	7.969.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bakesbangpo 1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	8.150.000	
6.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bakesbangpo 1	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	5.479.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bakesbangpo 1	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	5.500.000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Keg./ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bakesbang-pol	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2.932.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bakesbang-pol	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	3.000.000	
6.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bakesbang-pol	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	8.397.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bakesbangpol	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	8.500.000	
<b>6.2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.546.242.537</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.678.409.998</b>	
6.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bakesbangpol	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 org	2.521.489.537	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bakesbangpol	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 org	2.654.909.998	
6.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bakesbangpol	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	20.808.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bakesbangpol	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	20.000.000	
6.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bakesbangpol	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 laporan	3.945.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bakesbangpol	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 laporan	3.500.000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Keg./ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
<b>6.3.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.080.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.100.000</b>	
6.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bakesbangpo 1	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	2.080.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bakesbangpo 1	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	2.100.000	
<b>6.4.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD</b>	<b>100%</b>	<b>13.300.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD</b>	<b>100%</b>	<b>60.200.000</b>	
6.4.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lumajang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	38 paket	13.300.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lumajang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	38 paket	13.300.000	
<b>6.5.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD</b>	<b>100%</b>	<b>222.252.108</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD</b>	<b>100%</b>	<b>224.850.000</b>	
6.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bakesbangpo 1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	6.706.608	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bakesbangpo 1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	7.100.000	
6.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bakesbangpo 1	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	74.415.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bakesbangpo 1	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	66.500.000	
6.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bakesbangpo 1	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	15.322.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bakesbangpo 1	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	15.650.000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Keg./ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
6.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bakesbangpo 1	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	3.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bakesbangpo 1	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	3.600.000	
6.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bakesbangpo 1	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	70 laporan	4.320.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bakesbangpo 1	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	75 laporan	5.500.000	
6.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bakesbangpo 1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	386 laporan	115.808.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bakesbangpo 1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	395 laporan	126.500.000	
<b>6.6.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase fasilitasi pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>81.779.200</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase fasilitasi pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.970.000</b>	
6.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bakesbangpo 1	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 unit	81.779.200	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bakesbangpo 1	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	2.970.000	
<b>6.7.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor</b>	<b>100%</b>	<b>230.671.200</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor</b>	<b>100%</b>	<b>230.671.200</b>	
6.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bakesbangpo 1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	90.492.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bakesbangpo 1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	90.492.000	
6.7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bakesbangpo 1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 laporan	140.179.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bakesbangpo 1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 laporan	140.179.200	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Keg./ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
<b>6.8.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase fasilitasi pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>131.850.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase fasilitasi pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>132.800.000</b>	
6.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bakesbangpo 1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	102.800.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bakesbangpo 1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	106.250.000	
6.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bakesbangpo 1	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 unit	29.050.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bakesbangpo 1	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 unit	26.550.000	



Berdasarkan uraian tabel 2.5.diatas juga mendukung tentang program dan kegiatan yang mengacu pada Pengarusutamaan Gender Tahun 2023 yang terletak pada 2 (dua) program yakni :

- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
- Program Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

## **2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil Musrenbang mulai dari tingkat desa yang ditindaklanjuti sampai dengan Tingkat Kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisiensi dalam perencanaan anggaran dan efektifitas dalam pencapaian tujuan.Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja, melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan kondusifitas wilayah sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan yang bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan rencana kerja yang tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Bakesbangpol Kab. Lumajang, seperti tersaji dalam Tabel 2.6.dibawah ini.

**Tabel T-C. 32**

**Usulan Program/Kegiatan/Sub kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023**

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
<b>1</b>	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>		<b>Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan</b>	<b>100%</b>	
<b>1.1</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>		<b>Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>1 dokumen</b>	
1.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bakesbangpol	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 dokumen	
1.1.2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Lumajang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	13.851 orang	
1.1.3	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 laporan	
<b>2.</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>		<b>Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>100%</b>	
<b>2.2.</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik</b>		<b>Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>1 dokumen</b>	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
2.1.1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Bakesbangpol	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 dokumen	
2.1.2	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab. Lumajang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	422 org	
2.1.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 laporan	
<b>3.</b>	<b>PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>		<b>Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</b>	<b>100%</b>	
<b>3.1.</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>		<b>Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>1 dokumen</b>	
3.1.1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Bakesbangpol	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 dokumen	
3.1.2	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Lumajang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	201 orang	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
3.1.3	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	52 laporan	
<b>4.</b>	<b>PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>		<b>Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya</b>	<b>100%</b>	
<b>4.1.</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>		<b>Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan teknis Fasilitasi Teknis Pemantapan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya</b>	<b>3 dokumen</b>	
4.1.1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya & Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Bakesbangpol	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 dokumen	
4.1.2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Lumajang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	680 orang	
4.1.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 laporan	
<b>5.</b>	<b>PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>		<b>Persentase potensi permasalahan strategis yang ditangani</b>	<b>100%</b>	
<b>5.1.</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>		<b>Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan Nasional pemantapan kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>1 dokumen</b>	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
5.1.1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Bakesbangpol	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 dokumen	
5.1.2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Lumajang	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta PKS	185 orang	
5.1.3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Lumajang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	160 orang	
5.1.4	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	4 dokumen	
<b>6.</b>	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>		<b>Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran</b>	<b>100%</b>	
<b>6.1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>100%</b>	
6.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bakesbangpol	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	
6.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bakesbangpol	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
6.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bakesbangpol	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	
<b>6.2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	
6.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bakesbangpol	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang	
6.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bakesbangpol	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	
6.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bakesbangpol	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 laporan	
<b>6.3.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	
6.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bakesbangpol	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	
<b>6.4.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD</b>	<b>100%</b>	
6.4.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lumajang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	38 paket	
<b>6.5.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD</b>	<b>100%</b>	
6.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bakesbangpol	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	
6.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bakesbangpol	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	
6.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bakesbangpol	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	
6.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bakesbangpol	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
6.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bakesbangpol	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	70 laporan	
6.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bakesbangpol	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	386 laporan	
<b>6.6.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase fasilitasi pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	
6.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bakesbangpol	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 unit	
<b>6.7.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor</b>	<b>100%</b>	
6.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bakesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	
6.7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bakesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 laporan	
<b>6.8.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase fasilitasi pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	
6.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bakesbangpol	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	
6.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bakesbangpol	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 unit	

## 2.6. ANALIS PELAKSANAAN INOVASI PERANGKAT DAERAH

Salah satu tuntutan dalam Reformasi adalah reformasi di bidang birokrasi pemerintahan. Reformasi birokrasi menjadi harapan baru masyarakat bagi terwujudnya birokrasi pemerintahan yang bebas dari KKN dan dapat memberikan pelayanan secara tepat, cepat, efektif, efisien dan konsisten sebagai perwujudan dari birokrasi yang baik dan akuntabel. Peningkatan pelayanan publik menjadi concern atau perhatian utama dalam reformasi birokrasi karena pelayanan publik menjadi pusat dari setiap aktifitas dimana semua komponen dalam lembaga pemerintahan baik kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur diarahkan. Selain itu kepuasan atas pelayanan publik menjadi indikator yang kuat dalam mengukur kinerja birokrasi.

Pemerintah Daerah sesuai kewenangan yang dimilikinya diharapkan mampu menghasilkan keputusan dan tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya. Sejalan dengan hal tersebut, dibutuhkan upaya yang serius untuk mengangkat kualitas keputusan dan tindakan Pemerintah Daerah agar lebih efektif dan efisien melalui terobosan-terobosan inovatif. Inovasi dalam pemerintahan merupakan sebuah ide kreatif dalam melakukan pembaharuan dalam sistem pemerintahan guna meningkatkan kinerja pemerintahan.

Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat inovasi yakni Siwasda (pusat komunikasi dan informasi kewaspadaan di daerah). Latar belakang dan tujuan dibuatnya aplikasi siwasda berbasis digital :

- A. Dalam konteks konflik sosial ada beberapa wujud konflik yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena sangat kuat terkonfirmasi sebagai konflik yang mengakar dan mengemuka secara berulang-ulang adapun diantaranya :
  - a. Konflik ideologis yang bersumber pada perbenturan nilai tentang bentuk Negara yang digunakan sebagai bingkai bagi bangsa Indonesia yang merdeka.



- b. Konflik horizontal rasial yang bersumber pada perbedaan etnis yang cenderung rasial, dan dipicu oleh kesenjangan dalam penguasaan sumber-sumber ekonomi.
  - c. Konflik vertikal yang bersumber pada ketidakpuasan masyarakat pada penguasa yang sering kali meledak dalam bentuk konflik horizontal karena dua factor, yaitu :
    - Rasa frustrasi dan tidak berdaya masyarakat dalam menghadapi kuatnya kekuasaan.
    - Pemanfaatan potensi-potensi konflik horizontal oleh penguasa untuk mempertahankan kelanggengan kekuasaan.
  - d. Konflik politik yang bersumber pada pertarungan antara kepentingan pemerintah, kelompok dan masyarakat lokal yang dapat berakibat pada ancaman.
- B. Adapun konflik sosial dapat bersumber dari :
- a. Sentimen agama, suku dan etnis.
  - b. Perebutan batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi.
  - c. Perebutan sumber daya tanah antar masyarakat.
  - d. Distribusi sumber daya yang tidak seimbang antara masyarakat.
- C. Permasalahan yang ada di Kabupaten Lumajang yang memicu konflik sosial sesuai wujud dan sumber konflik yang mendapatkan perhatian khusus karena sangat kuat terkonfirmasi sebagai konflik yang mengakar dan mengemuka secara berulang-ulang diantaranya :
- a. Konflik politik yang bersumber pada perebutan sumber daya tanah antara kelompok dan masyarakat lokal serta distribusi sumber daya yang tidak seimbang antara masyarakat.
- Contoh :**
- Permasalahan Tanah Translok di Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.
  - Permasalahan Tanah/Bengkok Desa di beberapa Desa yang ada di Kabupaten Lumajang
  - Permasalahan Tanah PT Ranulading dengan Kelompok Masyarakat yang ada di Kecamatan Randuagung/Klakah Kabupaten Lumajang

- Permasalahan Tanah antara Pihak PT Perhutani dengan Masyarakat Lokal setempat sampai menggerakkan massa melakukan Demonstrasi ke DPRD pada Tahun 2018
  - Permasalahan Tanah Waris/Konflik pribadi di Kecamatan Kunir Kab.Lumajang
  - Permasalahan Tanah Waris/Konflik pribadi di Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kab.Lumajang
  - Permasalahan Tanah di Lemongan Desa Papringan Kecamatan Klakah antara Pihak PTPN dengan Masyarakat yang ada di Kab.Lumajang
  - Permasalahan Tambang pasir Ilegal serta Stockpile illegal yang ada di Kabupaten Lumajang
  - Permasalahan Jalur tambang pasir yang ada di Kabupaten Lumajang
  - Permasalahan Polusi Debu Pasir antara Pihak Perusahaan dengan masyarakat yang menuntut adanya kompensasi.
- b. Konflik horizontal rasial yang bersumber dari Sentimen agama,suku dan etnis.

**Contoh :**

- Permasalahan perusakan patung penjaga pintu dwarapala di Pura Mandaragiri semeru agung Kecamatan Senduro yang terjadi pada Tahun 2018.
- Permasalahan perusakan simbol umat Hindu (Pelinggih/Patmasari) di Desa Argosari Kecamatan Senduro.
- Permasalahan terkait Posisi Makam yang tidak semestinya yang terjadi di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.
- Permasalahan Sekdes Desa Jatigono yang dugaan oleh masyarakat menganut paham fanatisme.
- Permasalahan keberadaan Yayasan Suryanuswantara (Tikus Pithi & Bocah angon) yang dipermasalahkan keberadaanya oleh masyarakat .

## **DASAR ATURAN**

Dengan telah terbentuknya Tim di Tingkat Kabupaten diantaranya

- a. Tim pemantauan perkembangan politik kab.lumajang SK Bupati nomor 188.45/27/427.12/2015;
- b. Tim fasilitasi penyelesaian masalah penyelenggaraan pemerintahan desa di kab.lumajang SK Bupati nomor 188.45/58/427.12/2016;
- c. Tim terpadu penanganan gangguan keamanan kab.lumajang SK Bupati nomor 188.45/119/427.12/2014;
- d. Forum kewaspadaan dini masyarakat (fkdm) kab.lumajang SK Bupati nomor 188.45/94/427.12/2018;
- e. Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten Lumajang SK Bupati Nomor : 188.45/315/427.12/2019;
- f. Tim terpadu penanganan konflik sosial kab.lumajang SK Bupati nomor 188.45/381/427.12/2015.

## **HASIL**

Dengan terbentuknya SK Tim terpadu penanganan konflik sosial menggunakan pendekatan dalam penyelesaian konflik dengan cara pemecahan konflik diantaranya :

1. Mediasi, yaitu penghentian pertikaian oleh pihak ketiga tetapi tidak diberikan keputusan yang mengikat.

Contoh penyelesaian permasalahan yang telah terselesaikan :

- a. Permasalahan konflik Tanah di Ranulading
  - b. Permasalahan Jalur Tambang Pasir di Wilayah Kabupaten Lumajang
  - c. Permasalahan Polusi Pabrik Kayu di PT PSI di Kecamatan Kunir
  - d. Permasalahan Sengketa Lahan antara penduduk Argosari dengan Pihak Perhutani
  - e. Permasalahan Pembangunan jalur Alternatif wates Wetan Kecamatan Ranuyoso
  - f. Permasalahan parkir truck mengangkut kayu yang memakan bahu jalan di Dusun Klomprit Desa Mojosari Kecamatan Sumpersuko
2. Konsiliasi, yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih sehingga tercapai persetujuan bersama.

Contoh penyelesaian permasalahan yang terselesaikan :

- a. Permasalahan Pemberhentian sepihak Karyawan di PT Lumajang Satwa bergerak di bidang peternakan Ayam Dusun Tesirejo Desa Kertosari Kecamatan Pasrujambe
  - b. Permasalahan terkait penutupan Portal timbangan Pasir Milik PT Mutiara Halim di Desa Kedungjajang Kecamatan Kedungjajang
  - c. Permasalahan pengakuan Lahan yang di pakai Jalur Tambang pasir di Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian
  - d. Permasalahan terkait Tanah translok di Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh
3. Ajudikasi, yaitu penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan.  
Contoh penyelesaian permasalahan yang masuk ranah ajudikasi
- a. Permasalahan penutupan café Vision Vista di Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang
  - b. Permasalahan ADD Kepala Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro
  - c. Permasalahan penganiyayaan mantan Kades Pasrujambe terkait Tambang pasir
4. Kompromi, yaitu jalan tengah yang dicapai oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik.  
Contoh penyelesaian permasalahan yang masuk ranah kompromi :
- a. Permasalahan Jalan Desa yang digunakan jalur Tambang Pasir
  - b. Permasalahan pengrusakan arca umat Hindu di Desa Argosari Kecamatan Senduro
  - c. Permasalahan Pengrusakan Patung di Pura mandara Giri Semeru Agung di Desa Senduro Kecamatan Senduro
  - d. Permasalahan terkait Posisi Makam yang tidak semestinya yang terjadi di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.
  - e. Permasalahan keberadaan Yayasan Suryanuswantara (Tikus Pithi & Bocah angon) yang dipermasalahkan keberadaanya oleh masyarakat
5. Integrasi, yaitu mendiskusikan, menelaah, dan mempertimbangkan kembali pendapat-pendapat sampai diperoleh suatu keputusan yang memaksa semua pihak.  
Contoh penyelesaian permasalahan yang masuk ranah integrasi

- a. Permasalahan terkait Peternakan Babi di Desa Dawuhan Lor Kecamatan Sukodono
- b. Permasalahan Tanah di Lemongan Desa Papringan Kecamatan Klakah antara Pihak PTPN dengan Masyarakat yang ada di Kab.Lumajang

## **KOLABORASI**

Terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Wilayah Kabupaten Lumajang

Maka kedepan Kabupaten Lumajang memiliki terobosan yakni merencanakan Aplikasi **SIWASDA** (Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini Daerah) dalam mengembangkan system peringatan Dini melalui media komunikasi dan informasi untuk meredam potensi konflik yang akan muncul.

Tujuan dari adanya Aplikasi **SIWASDA** adalah untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan pada layanan berbasis Aplikasi digital. Secara rinci manfaat dari Aplikasi **SIWASDA** adalah sebagai berikut :

- 1) Aplikasi SIWASDA berguna sebagai Deteksi dan pencegahan Dini Kemudahan dalam penerapan **DENI** dan **CENI** di tingkat Daerah. Menjaga keamanan dan kenyamanan Masyarakat sehingga terhindar dari Konflik sosial yang muncul di Daerah.
- 2) Cepat dalam mengambil tindakan/kebijakan pimpinan/Kepala Daerah untuk mengurangi situasi dan dampak darurat yang membutuhkan penanganan cepat.
- 3) Aplikasi Dapat digunakan masyarakat atau pemangku kepentingan di berbagai tempat seperti di Tingkat Kecamatan maupun Desa/dapat menjangkau Daerah Plosok dikarenakan mayoritas masyarakat dilumajang sudah memiliki Gadget.
- 4) Kepastian dalam menindaklanjuti karena laporan masyarakat dapat menjadi bukti awal terjadinya konflik yang terjadi pada masyarakat.

## **GAMBARAN KEADAAN ATAU PENANGANAN MASALAH SETELAH DITERAPKANYA INOVASI**

A. Pelaksanaan aplikasi **SIWASDA** akan menjadi jembatan, sebuah fasilitas untuk masyarakat berpartisipasi dibidang keamanan dan kenyamanan Lingkungan yang dilakukan pada kurun waktu tertentu akan memperoleh output utama sebagai berikut:

- a. Peningkatan keamanan dan kenyamanan yang berbasis masyarakat, yang dapat dilihat dari jumlah aduan.
- b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan Masyarakat yang dapat dilihat dari jumlah data yang masuk melalui penggunaan aplikasi **SIWASDA**
- c. Memperkuat kebijakan dalam pengembangan berbasis sistem informasi.

B. Frekuensi penggunaan aplikasi yang mudah, cepat dan nyaman akan dapat menjadi sumber informasi pemerintah Daerah antara lain berisi:

- a. Informasi Gejolak yang akan muncul pada masyarakat/kelompok masyarakat segera terdeteksi serta dicegah sedini mungkin tanpa konflik muncul ke permukaan.
- b. Peluang perbaikan terhadap pengelolaan manajemen khususnya dibidang penanganan konflik
- c. Bank data dan bukti ketidaksesuaian yang bersumber dari masyarakat
- d. mendorong pencapaian peningkatan keamanan dan kenyamanan masyarakat melalui pelayanan yang responsif dari tim yang mendukung sistem pengaduan melalui aplikasi **SIWASDA**.

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018–2023 adalah :

***VISI***

*“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA  
SAING, MAKMUR & BERMARTABAT”*

***MISI***

Dalam rangka mewujudkan visi, maka perlu ditetapkan 3 (tiga) misi Kabupaten Lumajang, yaitu :

- 1) Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro dan pariwisata;
- 2) Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri;
- 3) Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (good and clean governance).

Dari ketiga misi tersebut diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang menunjang misi ketiga (3), untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Bakesbangpol sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Adapun fungsi Bakesbangpol, yaitu :

- a) Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- b) Penetapan program kerja dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur;
- c) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis pembinaan kesatuan bangsa dan politik;
- d) Penyusunan pedoman teknis dan penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa dan politik;

- e) Peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan, kerukunan antar umat, politik dalam negeri dan pembinaan organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat;
- f) Peningkatan kajian masalah strategis dan penanganannya di bidang ideologi, politik dalam negeri, ekonomi, sosial budaya dan ketertiban masyarakat;
- g) Pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- h) Pemberian saran dan pertimbangan di bidang tugasnya kepada Bupati; dan Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan Bupati.

Adapun kelembagaan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Jawa Timur diatur dalam Perda Jatim Nomor 101 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Kesbangpol Prov. Jatim yang mempunyai tugas pokok, yakni ***“Menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Prov. Jatim di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta tugas Dekonsentrasi yang dilimpahkan Pemerintah”***

Dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim ketegangan lintas-batas antar negara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri.



Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatann peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum yang diberi tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi tersebut, dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Lumajang 2018-2023, strategi pembangunan dan arah kebijakan Kabupaten Lumajang diarahkan pada :

- 1) Good & clean governance melalui pengembangan e – governance;
- 2) Mempercepat pemenuhan pelayanan dasar melalui penguatan kapasitas pemerintah;
- 3) Membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis pada nilai agama dan kearifan lokal;
- 4) Melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas.

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD**

Tujuan merupakan penjabatan atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi, yakni “*meningkatnya kepuasan masyarakat*” sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai. Tujuan, indikator, formula dan target Tahun 2023 tertuang pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.1.**

**Tujuan, Indikator, Formula dan Target Tahun 2023**

Tujuan	Indikator	Formula	Target Tahun 2023
Meningkatnya kepuasan masyarakat	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud & Tibmas)	$\frac{\text{Jumlah konflik terkait Ipoleksosbud}}{\text{Jumlah konflik terkait Ipoleksosbud \& Tibmas yang ada}} \times 100\%$	100%

**3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jatim dan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat, serta Perbup Lumajang Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Yang dioperasionalkan dalam serangkaian program dan kegiatan guna mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan mengacu pada isu strategis, P-RPJMD dan P-Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka program dan kegiatan Bakesbangpol Kab. Lumajang Tahun 2023 terdiri atas 6 program, 13 kegiatan dengan pagu indikatif Rp. 5.407.860.248,- (*Lima Milyar Empat Ratus Tujuh Ratus Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*)

Rumusan rencana program dan kegiatan PD Tahun 2023 dan perkiraan maju Tahun 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang dapat dijelaskan pada tabel 3.3. sebagaimanaterlampir.

**Tabel 3.3.**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023**  
**Dan Prakiraan Maju Tahun 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Perio ritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Cat. Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
<b>8.01.</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>						<b>5.162.824.893</b>	<b>DAU</b>			<b>5.249.274.546</b>
<b>8.01.01</b>	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran</b>				<b>100%</b>	<b>3.251.873.045</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>3.310.251.198</b>
<b>8.01.01.201</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>				<b>100%</b>	<b>24.778.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>25.150.000</b>
8.01.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 dokumen	7.969.500	DAU		3 dokumen	8.150.000
			Menyusun dokumen Rentra, Renstra Mini, Renja dan P-Renja	1	Bakesbangpol	3 dokumen	7.969.500	DAU		3 dokumen	8.150.000
8.01.01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 dokuman	5.479.000	DAU		1 dokumen	5.500.000
			Menyusun dokumen RKA-OPD & P-RKA OPD	1	Bakesbangpol	1 dokuman	5.479.000	DAU		1 dokumen	5.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Perio ritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Cat. Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Penyusunan P-RKA OPD	1	Bakesbangpol	1 dokumen	2.932.000	DAU		1 dokumen	3.000.000
8.01.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 laporan	8.397.500	DAU		5 laporan	8.500.000
			Menyusun LKJ TW. 1 - TW 4, LKJ Tahunan	1	Bakesbangpol	5 laporan	8.397.500	DAU		5 laporan	8.500.000
<b>8.01.01.202</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>100%</b>	<b>2.546.242.537</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>2.678.409.998</b>
8.01.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 orang	2.521.489.537	DAU		26 orang	2.654.909.998
			Menyusun dan mengajukan gaji & tunjangan ASN	1	Bakesbangpol	26 orang	2.521.489.537	DAU		26 orang	2.654.909.998
8.01.01.202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 dokumen	20.808.000	DAU		12 dokumen	20.000.000
			Menyusun dokumen fungsional OPD	1	Bakesbangpol	12 dokumen	20.808.000	DAU		12 dokumen	20.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Perio ritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Cat. Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
8.01.01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 laporan	3.945.000	DAU		4 laporan	3.500.000
			Penyusunan Laporan Keuangan (LK) OPD (meliputi LO, LRA, Neraca, CALK)	1	Bakesbangpol	4 laporan	3.945.000	DAU		4 laporan	3.500.000
<b>8.01.01.203</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah</b>				<b>100%</b>	<b>2.080.000</b>			<b>100%</b>	<b>2.100.000</b>
8.01.01.203.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 laporan	2.080.000	DAU		2 laporan	2.100.000
			Penyusunan Laporan RKBMD, P-RKBMD	1	Bakesbangpol	2 dokumen	2.080.000	DAU		2 dokumen	2.100.000
<b>8.01.01.205</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD</b>				<b>100%</b>	<b>13.300.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>13.300.000</b>
8.01.01.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				38 paket	13.300.000	DAU		38 paket	13.300.000
			Pengadaan batik lumajangan	1	Kab. Lumajang	38 paket	13.300.000	DAU		38 paket	13.300.000
<b>8.01.01.206</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD</b>				<b>100%</b>	<b>221.173.068</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>213.000.000</b>
8.01.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 paket	6.706.608	DAU		5 paket	7.100.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Perio ritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Cat. Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
			Pengadaan penerangan	1	Kec. Lumajang	3 jenis	5.015.000	DAU		3 jenis	5.100.000
			Pengadaan instalansi listrik	1	Kec. Lumajang	5 jenis	1.691.608	DAU		5 jenis	2.000.000
8.01.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 paket	75.415.960	DAU		2 paket	66.500.000
			Pengadaan alat kebersihan, bahan kebersihan	1	Bakesbangpol	12 paket	6.782.700	DAU		13 jenis	6.500.000
			Pengadaan ATK	2	Bakesbangpol	25 jenis	68.633.260	DAU		22 jenis	60.000.000
8.01.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					15.322.500				15.650.000
			Penyediaan cetakan	2	Kec. Lumajang	4 jenis cetakan	7.672.500	DAU		4 jenis cetakan	7.000.000
			Penyediaan foto copy dan penjiilidan	1	Kec. Lumajang	150 fasilitasi	7.650.000	DAU		150 fasilitasi	8.650.000
8.01.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 dokumen	3.600.000	DAU		12 dokumen	3.600.000
			Penyediaan surat kabar		Bakesbangpol	12 eks	3.600.000	DAU		12 eks	3.750.000
8.01.01.206.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				70 laporan	4.320.000	DAU		75 laporan	5.500.000
			Fasilitasi kunjungan tamu (tamu dari luar kota, parpol, lsm, dan lembaga lainnya)	1	Bakesbangpol	70 laporan	4.320.000	DAU		75 laporan	5.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Perio ritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Cat. Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
8.01.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				386 laporan	115.808.000	DAU		395 laporan	126.500.000
			Fasilitasi rapat koordinasi bidang Kesbangpol	1	Bakesbangpol	151 laporan	9.000.000	DAU		151 laporan	9.500.000
			Fasilitasi perjadi n DD dan DL Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana	1	Dalam & Luar Kab. Lumajang	105 laporan	99.073.000	DAU		105 laporan	110.000.000
<b>8.01.01.207</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi pengadaan Barang Milik Daerah</b>				<b>100%</b>	<b>81.779.200</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>2.970.000</b>
8.01.01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 unit	81.779.200	DAU		3 unit	2.970.000
			Pengadaan speaker aktif untuk menunjang kegiatan SKJ	1	Bakesbangpol	1 unit	7.050.000	DAU			
			Pengadaan paket sound system indoor (aula)	1	Bakesbangpol	1 unit	25.000.000	DAU			
			Pengadaan PC untuk 4 bidang	1	Bakesbangpol	4 unit	32.269.200	DAU			
			Pengadaan kipas angin	1	Bakesbangpol	4 unit	3.960.000	DAU		3 unit	2.970.000
			Pengadaan LCD Proyektor untuk aula	1	Bakesbangpol	1 unit	13.500.000	DAU			
<b>8.01.01.208</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor</b>				<b>100%</b>	<b>230.671.200</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>230.671.200</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Perio ritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Cat. Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
8.01.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 laporan	90.492.000	DAU		48 laporan	90.492.000
			Pembayaran tagihan listrik	1	Bakesbangpol	1 rekening	54.000.000	DAU		1 rekening	54.000.000
			Pembayaran tagihan telepon	1	Bakesbangpol	1 rekening	4.200.000	DAU		1 rekening	4.200.000
			Pembayaran tagihan internet	1	Bakesbangpol	2 rekening	31.860.000	DAU		2 rekening	31.860.000
			Pembayaran tagihan air	1	Bakesbangpol	1 rekening	432.000	DAU		1 rekening	432.000
8.01.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				60 laporan	140.179.200			60 laporan	140.179.200
			Pembayaran upah TKB untuk 5 orang	1	Bakesbangpol	12 laporan	116.400.000	DAU		12 laporan	116.400.000
			Pembayaran JKK + JKM dan BPJS Kesehatan TKB untuk 14 orang	1	Bakesbangpol	12 laporan	20479200	DAU		12 laporan	20479200
			Penyediaan jasa instruktur senam	1	Bakesbangpol	12 bulan	1.800.000	DAU		12 bulan	1.800.000
			Pembayaran retribusi sampah	1	Bakesbangpol	12 bulan	900.000	DAU		12 bulan	900.000
			Pembayaran iuran TV Kabel	1	Bakesbangpol	12 bulan	600.000	DAU		12 bulan	600.000
<b>8.01.01.209</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>				<b>100%</b>	<b>131.850.000</b>			<b>100%</b>	<b>132.800.000</b>



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Perio ritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Cat. Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
8.01.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					102.800.000	DAU		20 unit	106.250.000
			Penyediaan BBM kendaraan dinas roda 4 (empat)	1	Bakesbangpol	4 unit	33.750.000	DAU		4 unit	35.000.000
			Service kendaraan dinas roda 4	1	Bakesbangpol	4 unit	57.800.000	DAU		4 unit	60.000.000
			Pembayaran pajak tahunan kendaraan dinas roda 4	1	Bakesbangpol	2 unit	2.750.000	DAU		2 unit	2.750.000
			Pembayaran pajak tahunan dan ganti plat kendaraan dinas roda 4	1	Bakesbangpol	2 unit	2.500.000	DAU		2 unit	2.500.000
			Service kendaraan R2	1	Bakesbangpol	2 unit	2.000.000	DAU		2 unit	2.000.000
			Pembayaran pajak tahunan kendaraan R2	1	Bakesbangpol	15 unit	2.000.000	DAU		15 unit	2.000.000
			Pembayaran pajak tahunan dan ganti plat kendaraan R2	1	Bakesbangpol	5 unit	2.000.000	DAU		5 unit	2.000.000
8.01.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				37 unit	29.050.000	DAU		37 unit	26.550.000
			Pemeliharaan rutin / berkala komputer dan laptop	1	Bakesbangpol	17 unit	11.900.000	DAU		17 unit	11.900.000
			Service printer	1	Bakesbangpol	11 unit	7.150.000	DAU		11 unit	7.150.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Perio ritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Cat. Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
			Pemeliharaan rutin / berkala HT dan repitear	2	Desa Pasru-jambe	10 unit	10.000.000	DAU		15 unit	7.500.000
<b>8.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan</b>				<b>100%</b>	<b>198.501.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>205.150.000</b>
<b>8.01.02.201</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>				<b>1 dokumen</b>	<b>198.501.000</b>	<b>DAU</b>		<b>1 dokumen</b>	<b>205.150.000</b>
8.01.02.201.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 dokumen	3.267.000	DAU		1 dokumen	3.500.000
			Penyusunan SOP upacara	1	Bakesbangpol	1 dok	3.267.000	DAU		1 dok	3.500.000
8.01.02.201.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			Kab. Lumajang	13.851 orang	183.684.000	DAU		13.851 orang	189.650.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Perio ritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Cat. Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
			Upacara Hari-hari Besar Nasional : 1. HUT RI 2. Hari Pahlawan 3. Harkitnas 4. Hardiknas 5. Hari Lahir Pancasila 6. Harkitnas 8. Hapsak 9. Hari Bela Negara	2	Kab. Lumajang	13.500 orang	102.164.000	DAU		14.151 orang	105.000.000
			Pembayaran Upah TKB untuk 1 org	1	Bakesbangpol	1 orang	20.400.000	DAU		1 orang	20.400.000
			Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi Siswa	4	Kec. Lumajang	75 orang	12.892.500	DAU		100 org	13.500.000
			Talkshaw Wawasan Kebangsaan bagi Siswa	6	Kec. Yosowilangun	75 orang	12.892.500	DAU		100 org	13.500.000
			Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat	3	Kec. Yosowilangun	75 orang	15.892.500	DAU		100 org	16.500.000
			Lokakarya Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat	7	Kec Rowokangkung	75 orang	12.892.500	DAU		100 org	13.500.000
			Lomba Parade Cinta Tanah Air	5	Kab. Lumajang	50 orang	6.550.000	DAU		250 orang	7.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Perio ritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Cat. Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
8.01.02.201.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				4 laporan	11.550.000	DAU		6 laporan	12.000.000
			Monev Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan & Bela Negara	1	Kab. Lumajang	4 laporan	11.550.000	DAU		6 laporan	12.000.000
<b>8.01.03</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>				<b>100%</b>	<b>1.512.327.348</b>			<b>100%</b>	<b>1.517.327.348</b>
<b>8.01.03.201</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik</b>				<b>1 dokumen</b>	<b>1.200.669.548</b>	<b>DAU</b>		<b>1 dokumen</b>	<b>1.205.077.348</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Perio ritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Cat. Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
8.01.03.201.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan diBidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,Pemilu/Pemilukada, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 dokumen	1.148.400	DAU		1 dokumen	1.200.000
			Penyusunan SOP	1	Bakesbangpol	1 dokumen	1.148.400	DAU		1 dokumen	1.200.000
8.01.03.201.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Kab. Lumajang	422 orang	1.186.696.148	DAU		422 orang	1.190.927.348
			Pembayaran upah TKB	1	Bakesbangpol	2 orang	40.800.000	DAU		12 bulan	40.800.000
			Sosialisasi Peran Pemilih Pemula	3	Kec. Randuagung, Kec. Yosowilangun,Kec. Tempeh & Kec. Senduro	400 org	65.768.800	DAU		400 org	70.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Perio ritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Cat. Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
			Fasilitasi bantuan keuangan pada parpol	2	Bakesbangpol	20 orang	1.080.127.348	DAU		20 orang	1.080.127.348
8.01.03.201.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				10 laporan	12.825.000	DAU		10 laporan	12.950.000
			Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Hibah Banparpol	1	Kab. Lumajang	15 laporan	12.825.000	DAU		10 laporan	12.950.000
<b>8.01.04</b>	<b>PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</b>				<b>100%</b>	<b>79.376.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>80.400.000</b>
<b>8.01.04.201</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>				<b>1 dokumen</b>	<b>79.376.000</b>	<b>DAU</b>		<b>11 dokumen</b>	<b>2.120.400.000</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Perio ritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Cat. Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
8.01.04.201.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 dokumen	1.110.000	DAU		1 dokumen	1.200.000
			Penyusunan SOP bidang Ormas	1	Bakesbangpol	1 dokumen	1.110.000	DAU		1 dokumen	1.200.000
8.01.04.201.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
			Pembayaran Upah TKB	1	Bakesbangpol	1 orang	20.400.000	DAU		1 orang	20.400.000
			Diskusi Publik Organisasi Kemasyarakatan	2	Kec. Lumajang	200 orang	44.306.000	DAU		200 orang	45.000.000
8.01.04.201.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				52 laporan	13.560.000	DAU		52 laporan	13.800.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Perio ritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Cat. Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
			Monev dan pengawasan Ormas di daerah	2	Kab. Lumajang	52 laporan	5.850.000	DAU		52 laporan	5.900.000
			Monev dan pelaporan penggunaan dana hibah bagi penerima dana hibah	1	Bakesbangpol	52 laporan	7.710.000	DAU		52 laporan	7.900.000
<b>8.01.05</b>	<b>PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya</b>				<b>100%</b>	<b>127.516.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>127.670.000</b>
<b>8.01.05.201</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan teknis Fasilitasi Teknis Pemantapan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya</b>				<b>3 dokumen</b>	<b>127.670.000</b>	<b>DAU</b>		<b>3 dokumen</b>	<b>127.670.000</b>
8.01.05.201.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				3 dokumen	2.491.000	DAU		3 dokumen	2.600.000
			Penyusunan SOP	1	Bakesbangpol	3 dokumen	2.491.000	DAU		3 dokumen	2.600.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Perio ritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Cat. Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
8.01.05.201.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				680 orang	112.155.000	DAU		601 orang	112.200.000
			Pembayaran upah TKB	1	Kab. Lumajang	1 orang	20.400.000	DAU		12 bulan	20.400.000
			Sosialisasi Bahaya Narkoba terhadap generasi muda	3	Kec. Lumajang	100 orang	27.685.000	DAU		100orang	27.000.000
			Talkshow Bahaya Narkoba terhadap generasi muda (Siswa)	2	Kec. Senduro & Kunir	450 orang	34.800.000	DAU		400 orang	34.800.000
			Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	4	Kec. Lumajang	130 orang	29.270.000	DAU		100orang	30.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Perio ritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Cat. Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
8.01.05.201.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan diDaerah				4 laporan	12.870.000	DAU		4 laporan	12.870.000
			Monev dan pelaporan tempat ibadah & potensi konflik terkait Sara	1	Kab. Lumajang	4 laporan	12.870.000	DAU		4 laporan	12.870.000
<b>8.01.06</b>	<b>PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Persentase potensi permasalahan strategis yang ditangani</b>				<b>100%</b>	<b>273.263.300</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>286.010.000</b>
<b>8.01.06. 201</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan Nasional pemantapan kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>				<b>1 dokumen</b>	<b>273.263.300</b>	<b>DAU</b>		<b>1 dokumen</b>	<b>286.010.000</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Perio ritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Cat. Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
8.01.06.201.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				2 dokumen	6.134.800	DAU		2 dokumen	6.320.000
			Menyusun rumusan kebijakan di bidang kewaspadaan	1	Bakesbangpol	2 dokumen	3.094.800	DAU		2 dokumen	3.100.000
			Menyusun rumusan kebijakan di bidang penanganan potensi konflik sosial	2	Bakesbangpol	1 dokumen	3.040.000	DAU		1 dokumen	3.220.000
8.01.06.201.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				185 orang	173.118.500	DAU		188 orang	183.400.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Perio ritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Cat. Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
			Pembayaran upah tenaga kerja bulanan	1	Bakesbangpol	12 laporan	62.400.000	DAU		12 laporan	62.400.000
			Pamtup bidang kewaspadaan dini di daerah (Pilkades 8 Desa Tahun 2023)	2	Kab. Lumajang	12 laporan	54.560.000	DAU		12 laporan	56.000.000
			Pamtup pencegahan potensi konflik ipoleksosbud trantibum	3	Kab. Lumajang	12 laporan	31.560.000	DAU		12 laporan	40.000.000
			Penguatan forum kewaspadaan dini masyarakat	4	Ruang Semeru Lt II Pemda	1 laporan	24.598.500	DAU		1 laporan	25.000.000
8.01.06.201.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				160 orang	48.770.000	DAU		260 orang	59.490.000
			Fasilitasi Tim Keaspadaan Dini Daerah di Tk. Kabupaten	1	Kab. Lumajang	4 laporan	33.000.000	DAU		4 laporan	33.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Perio ritas	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Cat. Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
			Rakor kewaspadaan daerah Tk. Kecamatan se Kabupaten Lumajang	2	Kab. Lumajang	2 laporan	10.370.000	DAU		2 laporan	10.370.000
			Rakor Laporan penanganan konflik sosial di daerah (B04, B08, B12)	3	Bakesbangpol	3 laporan	5.400.000	DAU		3 laporan	5.400.000
8.01.06.201.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota			Kab. Lumajang	4 dokumen	76.800.000	DAU		4 dokumen	76.800.000
			Fasilitasi koordinasi Forkopimda	1	Kab. Lumajang	4 dokumen	205.200.000	DAU		4 dokumen	76.800.000

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**PERANGKAT DAERAH**

**4.1. PROGRAM UTAMA**

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 terdiri dari beberapa program utama, sedangkan untuk mencapai sasaran dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana terurai di bawah ini :

**Tabel 4.1.**  
**Program Utama, Kegiatan dan Sub Kegiatan**  
**Bakesbangpol Tahun 2023**

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.</li> <li>2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.</li> <li>3. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.</li> </ol>
Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;</li> <li>2. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah;</li> </ol>

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah; 2. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah; 3. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah; 2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah; 3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>
Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;</li> <li>2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;</li> <li>3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;</li> <li>4. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.</li> </ol>
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li> <li>2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</li> <li>3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</li> </ol>
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</li> <li>3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</li> </ol>
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</li> <li>2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</li> <li>3. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</li> </ol>



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor</li> <li>3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>5. Fasilitasi Kunjungan Tamu</li> <li>6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> </ol>
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> <li>2. Pengadaan Aset Tetap Lainnya</li> </ol>
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</li> </ol>
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> <li>2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> </ol>

#### 4.2. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran yang ingin dicapai/dihasilkan dari Rencana Kerja ini dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan rincian sebagaimana tabel 4.2.berikut :

**Tabel 4.2.**  
**Sasaran dan Indikator Kinerja**  
**Bakesbangpol Tahun 2023**

Program	Sasaran	Indikator	Target Kinerja
Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa dan Kebangsaan	Meningkatnya nilai - nilai ideologi Pancasila dan karakter bangsa pada generasi muda	<p><b>Output :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun.</li> </ol>	1 dokumen
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</li> </ol>	400 orang

Program	Sasaran	Indikator	Target Kinerja
		<p>3. Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p> <p><b>Outcome :</b> Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)</p>	<p>25 laporan</p> <p>100%</p>
<p>Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik</p>	<p>Meningkatnya pengembangan nilai-nilai kesatuan bangsa dan politik masyarakat</p>	<p><b>Output :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun</li> <li>2. Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah</li> <li>3. Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</li> </ol> <p><b>Outcome :</b> Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)</p>	<p>10 dokumen</p> <p>200 orang</p> <p>25 laporan</p> <p>100%</p>

Program	Sasaran	Indikator	Target Kinerja
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya Pemberdayaan & pengawasan organisasi kemasyarakatan	<p><b>Output :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun</li> <li>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</li> <li>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</li> </ol> <p><b>Outcome :</b></p> <p>Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)</p>	<p>8 dokumen</p> <p>200 orang</p> <p>30 laporan</p> <p>100%</p>
Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Meningkatnya pencegahan kerawanan Ipoleksosbud	<p><b>Output :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun</li> <li>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</li> <li>Jumlah Laporan Hasil monev dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Penceg. Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah</li> </ol> <p><b>Outcome :</b></p> <p>Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)</p>	<p>3 dokumen</p> <p>150 orang</p> <p>30 laporan</p> <p>100%</p>

Program	Sasaran	Indikator	Target Kinerja
Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya kewaspadaan dini masyarakat terhadap masalah, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan ketertiban	<p><b>Output :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun</li> <li>Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</li> <li>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</li> <li>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota</li> </ol> <p><b>Outcome :</b></p> <p>Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)</p>	<p>2 dokumen</p> <p>250 orang</p> <p>150 orang</p> <p>12 dokumen</p> <p>100%</p>
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	<p><b>Output :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li> <li>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</li> <li>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</li> </ol>	<p>4 dokumen</p> <p>2 dokumen</p> <p>5 laporan</p>

Program	Sasaran	Indikator	Target Kinerja
		4. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang
		5. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen
		6. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 laporan
		7. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 dokumen
		8. Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12 bulan
		9. Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 paket
		10. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 dokumen
		11. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket
		12. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	55 paket
		13. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 paket
		14. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 eks
		15. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	70 laporan
		16. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan
		17. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 unit
		18. Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 unit
		19. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan
		20. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan

Program	Sasaran	Indikator	Target Kinerja
		21. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya  22. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  <b>Outcome :</b> Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)	24 unit  48 unit  100%

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2023 merupakan rencana pelaksanaan tahun kelima penyelenggaraan pemerintahan, yang disusun secara sinergis dan berkesinambungan dengan pertimbangan tugas dan fungsi organisasi. Sebagai suatu dokumen perencanaan, Rencana Kerja Perangkat Daerah ini merupakan pedoman bagi Bakesbangpol dalam menyusun teknis operasional kegiatan yaitu Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023.

Dalam rangka mengoptimalkan rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, maka setiap unit pada lingkup Bakesbangpol yang secara langsung bertanggung jawab terhadap rencana kegiatan tersebut, dan berkewajiban untuk menuangkan rencana kegiatan tersebut ke dalam bentuk dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu RKA maupun DPA.

Selain itu, pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan setiap pengelola kegiatan maupun penanggung jawab kegiatan perlu melaksanakan pengendalian secara periodik dilaksanakan melalui pelaporan, monitoring dan evaluasi sebagai umpan balik bagi perencanaan yang akan datang.

Lumajang, 25 Agustus 2022

KEPALA BAKESBANGPOL



Drs. ARIF SUKAMDI  
NIP. 19720204 199101 1 001